



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 143 /PMK.02/2021

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
KEBUTUHAN MENDESAK ATAS PELAYANAN PENERBITAN KESESUAIAN  
KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN  
AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, dalam hal tertentu tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pelayanan karena kebutuhan mendesak, dapat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 241 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu diatur lebih lanjut tarif penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan penyederhanaan prosedur terkait investasi dan aktivitas bisnis;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEBUTUHAN MENDESAK ATAS PELAYANAN PENERBITAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

Pasal 1

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
2. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
3. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
4. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
5. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR.
6. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR selain RDTR.

7. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan penataan ruang.
8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
9. Kegiatan Berusaha adalah kegiatan pemanfaatan ruang yang memerlukan Perizinan Berusaha.
10. Kegiatan yang Bersifat Strategis Nasional adalah kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, serta mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan negara yang ditetapkan sebagai kebijakan Pemerintah Pusat melalui peraturan perundang-undangan.
11. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Indeks Jenis Usaha adalah nilai pengali tarif PNB yang dibedakan berdasarkan jenis usaha permohonan KKPR untuk mengakomodir variasi intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan jenis usaha.

13. Indeks Daerah adalah nilai pengali tarif PNBPN yang dibedakan berdasarkan lokasi objek permohonan KKPR untuk mengakomodir variasi intensitas pemanfaatan ruang serta dampak yang akan ditimbulkan di skala kabupaten/kota.
14. Luas Lahan adalah luasan lahan permohonan KKPR dalam satuan Hektar.
15. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

#### Pasal 2

- (1) Jenis PNBPN kebutuhan mendesak atas pelayanan penerbitan KKPR yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional meliputi penerimaan dari:
  - a. pelayanan penerbitan KKPR untuk Kegiatan Berusaha; dan
  - b. pelayanan penerbitan KKPR untuk Kegiatan yang Bersifat Strategis Nasional.
- (2) Jenis PNBPN yang berasal dari pelayanan penerbitan KKPR untuk Kegiatan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pelayanan penerbitan KKKPR; dan
  - b. pelayanan penerbitan PKKPR.
- (3) Jenis PNBPN yang berasal dari pelayanan penerbitan KKPR untuk Kegiatan yang Bersifat Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. pelayanan penerbitan KKKPR;
  - b. pelayanan penerbitan PKKPR; dan
  - c. pelayanan penerbitan RKKPR.
- (4) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan bagi pelaku usaha non UMK.

### Pasal 3

- (1) Tarif pelayanan penerbitan KKKPR untuk Kegiatan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan tarif pelayanan penerbitan KKKPR untuk Kegiatan yang Bersifat Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, dihitung berdasarkan rumus:

Tarif pelayanan penerbitan KKKPR = Indeks Jenis Usaha x [Rp600.000,00 + (Luas Lahan x Indeks Daerah x Rp1.475.000,00)]

- (2) Tarif pelayanan penerbitan PKKPR untuk Kegiatan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan tarif pelayanan penerbitan PKKPR untuk Kegiatan yang Bersifat Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, dihitung berdasarkan rumus:

Tarif pelayanan penerbitan PKKPR = Indeks Jenis Usaha x [Rp1.500.000,00 + (Luas Lahan x Indeks Daerah x Rp1.350.000,00)]

- (3) Tarif pelayanan penerbitan RKKPR untuk Kegiatan yang Bersifat Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, dihitung berdasarkan rumus:

Tarif pelayanan penerbitan RKKPR = Indeks Jenis Usaha x [Rp7.250.000,00 + (Luas Lahan x Indeks Daerah x Rp1.350.000,00)]

- (4) Besaran Indeks Jenis Usaha dan Indeks Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 4

- (1) Besaran Indeks Jenis Usaha dan Indeks Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dilakukan peninjauan ulang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

- (2) Perubahan besaran Indeks Jenis Usaha dan Indeks Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

#### Pasal 5

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) atau 0% (nol persen).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- (3) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

#### Pasal 6

Seluruh PNBP kebutuhan mendesak atas pelayanan penerbitan KKPR yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional wajib disetor ke Kas Negara.

#### Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Oktober 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

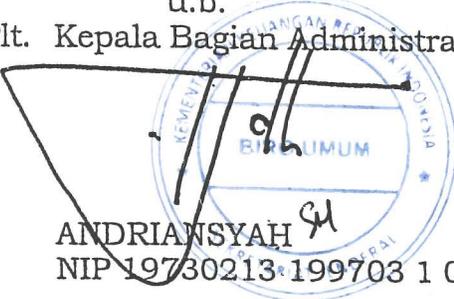
BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1189

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

  
ANDRIANSYAH  
NIP 19730213-199703 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 143/PMK.02/2021

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA  
BUKAN PAJAK KEBUTUHAN MENDESAK ATAS PELAYANAN  
PENERBITAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN  
RUANG YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGRARIA  
DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

BESARAN INDEKS JENIS USAHA DAN INDEKS DAERAH

A. INDEKS JENIS USAHA

JENIS USAHA		Index per Jenis Usaha
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,25
B	Pertambangan dan Penggalian	3,50
C	Industri Pengolahan	1,50
D	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin	0,25
E	<i>Treatment</i> Air, <i>Treatment</i> Air Limbah, <i>Treatment</i> dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi	0,25
F	Konstruksi	1,50
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi, dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	1,50
H	Pengangkutan dan Pergudangan	1,50
I	Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	0,75
J	Informasi Dan Komunikasi	0,50
K	Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	0,75
L	<i>Real Estate</i>	1,25
M	Aktivitas Profesional Ilmiah Dan Teknis	0,75
N	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya	0,75

O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,75
P	Pendidikan	0,25
Q	Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	0,50
R	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	0,75
S	Aktivitas Jasa Lainnya	0,75
T	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja, Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	0,50
U	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	1,50

#### B. INDEKS DAERAH

Provinsi	Nomor	Kabupaten/Kota	Indeks Daerah
Aceh	1	Kab. Simeulue	0.1000
Aceh	2	Kab. Aceh Singkil	0.1000
Aceh	3	Kab. Aceh Selatan	0.1000
Aceh	4	Kab. Aceh Tenggara	0.1000
Aceh	5	Kab. Aceh Timur	0.1000
Aceh	6	Kab. Aceh Tengah	0.1000
Aceh	7	Kab. Aceh Barat	0.1000
Aceh	8	Kab. Aceh Besar	0.1000
Aceh	9	Kab. Pidie	0.1000
Aceh	10	Kab. Bireun	0.1159
Aceh	11	Kab. Aceh Utara	0.1448
Aceh	12	Kab. Aceh Barat Daya	0.1000
Aceh	13	Kab. Gayo Lues	0.1000
Aceh	14	Kab. Aceh Tamiang	0.1000
Aceh	15	Kab. Nagan Raya	0.1000
Aceh	16	Kab. Aceh Jaya	0.1000
Aceh	17	Kab. Bener Meriah	0.1000
Aceh	18	Kab. Pidie Jaya	0.1000
Aceh	19	Kota Banda Aceh	0.2477
Aceh	20	Kota Sabang	0.1000
Aceh	21	Kota Langsa	0.2685

Provinsi	Nomor	Kabupaten/Kota	Indeks Daerah
Aceh	22	Kota Lhokseumawe	0.1167
Aceh	23	Kota Subulussalam	0.1000
Sumatera Utara	24	Kab. Nias	0.1000
Sumatera Utara	25	Kab. Mandailing Natal	0.1122
Sumatera Utara	26	Kab. Tapanuli Selatan	0.1000
Sumatera Utara	27	Kab. Tapanuli Tengah	0.1000
Sumatera Utara	28	Kab. Tapanuli Utara	0.1000
Sumatera Utara	29	Kab. Toba Samosir	0.1000
Sumatera Utara	30	Kab. Labuhan Batu	0.1000
Sumatera Utara	31	Kab. Asahan	0.1810
Sumatera Utara	32	Kab. Simalungun	0.2619
Sumatera Utara	33	Kab. Dairi	0.1000
Sumatera Utara	34	Kab. Karo	0.1000
Sumatera Utara	35	Kab. Deli Serdang	0.1000
Sumatera Utara	36	Kab. Langkat	0.1000
Sumatera Utara	37	Kab. Nias Selatan	0.1000
Sumatera Utara	38	Kab. Humbang Hasundutan	0.1000
Sumatera Utara	39	Kab. Pakpak Bharat	0.1000
Sumatera Utara	40	Kab. Samosir	0.1000
Sumatera Utara	41	Kab. Serdang Bedagai	0.1000
Sumatera Utara	42	Kab. Batu Bara	0.1417
Sumatera Utara	43	Kab. Padang Lawas Utara	0.1000
Sumatera Utara	44	Kab. Padang Lawas	0.1000
Sumatera Utara	45	Kab. Labuhan Batu Selatan	0.1648
Sumatera Utara	46	Kab. Labuhan Batu Utara	0.1562
Sumatera Utara	47	Kab. Nias Utara	0.1000
Sumatera Utara	48	Kab. Nias Barat	0.1000
Sumatera Utara	49	Kota Sibolga	0.1000
Sumatera Utara	50	Kota Tanjung Balai	0.1000
Sumatera Utara	51	Kota Pematang Siantar	0.1000
Sumatera Utara	52	Kota Tebing Tinggi	0.1000
Sumatera Utara	53	Kota Medan	1.0673
Sumatera Utara	54	Kota Binjai	0.1000
Sumatera Utara	55	Kota Padang Sidempuan	0.1000

Provinsi	Nomor	Kabupaten/Kota	Indeks Daerah
Sumatera Utara	56	Kota Gunungsitoli	0.1000
Riau	57	Kab. Kuantan Singingi	0.1000
Riau	58	Kab. Indragiri Hulu	0.1000
Riau	59	Kab. Indragiri Hilir	0.1000
Riau	60	Kab. Pelalawan	0.1000
Riau	61	Kab. Siak	0.1000
Riau	62	Kab. Kampar	0.1000
Riau	63	Kab. Rokan Hulu	0.1000
Riau	64	Kab. Bengkalis	0.1000
Riau	65	Kab. Rokan Hilir	0.1000
Riau	66	Kab. Kepulauan Meranti	0.1120
Riau	67	Kota Pekanbaru	0.6776
Riau	68	Kota Dumai	0.1419
Kep Riau	69	Kab. Karimun	0.1091
Kep Riau	70	Kab. Bintan	0.1000
Kep Riau	71	Kab. Natuna	0.1000
Kep Riau	72	Kab. Lingga	0.1000
Kep Riau	73	Kab. Kep. Anambas	0.1000
Kep Riau	74	Kota Batam	0.4266
Kep Riau	75	Kota Tanjung Pinang	0.1102
Jambi	76	Kab. Kerinci	0.1000
Jambi	77	Kab. Merangin	0.1000
Jambi	78	Kab. Sarolangun	0.1000
Jambi	79	Kab. Batanghari	0.1000
Jambi	80	Kab. Muaro Jambi	0.1000
Jambi	81	Kab. Tanjung Jabung Timur	0.1000
Jambi	82	Kab. Tanjung Jabung Barat	0.1000
Jambi	83	Kab. Tebo	0.1000
Jambi	84	Kab. Bungo	0.1000
Jambi	85	Kota Jambi	0.2735
Jambi	86	Kota Sungai Penuh	0.1253
Sumatera Barat	87	Kab. Kepulauan Mentawai	0.1000
Sumatera Barat	88	Kab. Pesisir Selatan	0.1000
Sumatera Barat	89	Kab. Solok	0.1000

Provinsi	Nomor	Kabupaten/Kota	Indeks Daerah
Sumatera Barat	90	Kab. Sijunjung	0.1000
Sumatera Barat	91	Kab. Tanah Datar	0.1000
Sumatera Barat	92	Kab. Padang Pariaman	0.1000
Sumatera Barat	93	Kab. Agam	0.1000
Sumatera Barat	94	Kab. Lima Puluh Kota	0.1000
Sumatera Barat	95	Kab. Pasaman	0.1000
Sumatera Barat	96	Kab. Solok Selatan	0.1000
Sumatera Barat	97	Kab. Dharmasraya	0.1000
Sumatera Barat	98	Kab. Pasaman Barat	0.1000
Sumatera Barat	99	Kota Padang	0.1756
Sumatera Barat	100	Kota Solok	0.1066
Sumatera Barat	101	Kota Sawahlunto	0.1000
Sumatera Barat	102	Kota Padang Panjang	0.2542
Sumatera Barat	103	Kota Bukittinggi	0.4458
Sumatera Barat	104	Kota Payakumbuh	0.1480
Sumatera Barat	105	Kota Pariaman	0.1000
Sumatera Selatan	106	Kab. Ogan Komering Ulu	0.1000
Sumatera Selatan	107	Kab. Ogan Komering Ilir	0.1000
Sumatera Selatan	108	Kab. Muara Enim	0.1000
Sumatera Selatan	109	Kab. Lahat	0.1000
Sumatera Selatan	110	Kab. Musi Rawas	0.1000
Sumatera Selatan	111	Kab. Musi Banyuasin	0.1000
Sumatera Selatan	112	Kab. Banyuasin	0.1000
Sumatera Selatan	113	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	0.1000
Sumatera Selatan	114	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	0.1145
Sumatera Selatan	115	Kab. Ogan Ilir	0.1020
Sumatera Selatan	116	Kab. Empat Lawang	0.1000
Sumatera Selatan	117	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	0.1000
Sumatera Selatan	118	Kab. Musi Rawas Utara	0.1000
Sumatera Selatan	119	Kota Palembang	0.6271
Sumatera Selatan	120	Kota Prabumulih	0.1000

Provinsi	Nomor	Kabupaten/Kota	Indeks Daerah
Sumatera Selatan	121	Kota Pagar Alam	0.1000
Sumatera Selatan	122	Kota Lubuk Linggau	0.1000
Lampung	123	Kab. Lampung Barat	0.1000
Lampung	124	Kab. Tanggamus	0.1000
Lampung	125	Kab. Lampung Selatan	0.1000
Lampung	126	Kab. Lampung Timur	0.1964
Lampung	127	Kab. Lampung Tengah	0.1000
Lampung	128	Kab. Lampung Utara	0.1000
Lampung	129	Kab. Way Kanan	0.1000
Lampung	130	Kab. Tulang Bawang	0.1000
Lampung	131	Kab. Pesawaran	0.1000
Lampung	132	Kab. Pringsewu	0.1000
Lampung	133	Kab. Mesuji	0.1000
Lampung	134	Kab. Tulang Bawang Barat	0.1000
Lampung	135	Kab. Pesisir Barat	0.1000
Lampung	136	Kota Bandar Lampung	0.3150
Lampung	137	Kota Metro	0.1000
Bengkulu	138	Kab. Bengkulu Selatan	0.1000
Bengkulu	139	Kab. Rejang Lebong	0.1000
Bengkulu	140	Kab. Bengkulu Utara	0.1000
Bengkulu	141	Kab. Kaur	0.1000
Bengkulu	142	Kab. Seluma	0.1000
Bengkulu	143	Kab. Mukomuko	0.1000
Bengkulu	144	Kab. Lebong	0.1000
Bengkulu	145	Kab. Kepahiang	0.1000
Bengkulu	146	Kab. Bengkulu Tengah	0.1000
Bengkulu	147	Kota Bengkulu	0.1177
Bangka Belitung	148	Kab. Bangka	0.1000
Bangka Belitung	149	Kab. Belitung	0.1955
Bangka Belitung	150	Kab. Bangka Barat	0.1000
Bangka Belitung	151	Kab. Bangka Tengah	0.1000
Bangka Belitung	152	Kab. Bangka Selatan	0.1000
Bangka Belitung	153	Kab. Belitung Timur	0.1000
Bangka Belitung	154	Kota Pangkal Pinang	0.1000

Provinsi	Nomor	Kabupaten/Kota	Indeks Daerah
Banten	155	Kab. Pandeglang	0.1000
Banten	156	Kab. Lebak	0.1000
Banten	157	Kab. Tangerang	0.2058
Banten	158	Kab. Serang	0.1000
Banten	159	Kota Tangerang	0.8370
Banten	160	Kota Cilegon	0.1829
Banten	161	Kota Serang	0.2151
Banten	162	Kota Tangerang Selatan	0.7284
DKI Jakarta	163	Kab. Kepulauan Seribu	0.1000
DKI Jakarta	164	Kota Jaksel	2.6844
DKI Jakarta	165	Kota Jaktim	1.8258
DKI Jakarta	166	Kota Jakpus	5.8410
DKI Jakarta	167	Kota Jakbar	1.9285
DKI Jakarta	168	Kota Jakut	2.6179
Jawa Barat	169	Kab. Bogor	0.1342
Jawa Barat	170	Kab. Sukabumi	0.1000
Jawa Barat	171	Kab. Cianjur	0.1000
Jawa Barat	172	Kab. Bandung	0.1406
Jawa Barat	173	Kab. Garut	0.1000
Jawa Barat	174	Kab. Tasikmalaya	0.1000
Jawa Barat	175	Kab. Ciamis	0.2868
Jawa Barat	176	Kab. Kuningan	0.1000
Jawa Barat	177	Kab. Cirebon	0.1051
Jawa Barat	178	Kab. Majalengka	0.1000
Jawa Barat	179	Kab. Sumedang	0.1000
Jawa Barat	180	Kab. Indramayu	0.1000
Jawa Barat	181	Kab. Subang	0.1000
Jawa Barat	182	Kab. Purwakarta	0.1000
Jawa Barat	183	Kab. Karawang	0.1000
Jawa Barat	184	Kab. Bekasi	0.3172
Jawa Barat	185	Kab. Bandung Barat	0.1000
Jawa Barat	186	Kab. Pangandaran	0.1000
Jawa Barat	187	Kota Bogor	0.5015
Jawa Barat	188	Kota Sukabumi	0.1596

Provinsi	Nomor	Kabupaten/Kota	Indeks Daerah
Jawa Barat	189	Kota Bandung	1.1858
Jawa Barat	190	Kota Cirebon	0.3272
Jawa Barat	191	Kota Bekasi	0.6162
Jawa Barat	192	Kota Depok	0.3889
Jawa Barat	193	Kota Cimahi	0.5591
Jawa Barat	194	Kota Tasikmalaya	0.1061
Jawa Barat	195	Kota Banjar	0.1000
Jawa Tengah	196	Kab. Cilacap	0.1000
Jawa Tengah	197	Kab. Banyumas	0.1619
Jawa Tengah	198	Kab. Purbalingga	0.1000
Jawa Tengah	199	Kab. Banjarnegara	0.1000
Jawa Tengah	200	Kab. Kebumen	0.1000
Jawa Tengah	201	Kab. Purworejo	0.1000
Jawa Tengah	202	Kab. Wonosobo	0.1000
Jawa Tengah	203	Kab. Magelang	0.1000
Jawa Tengah	204	Kab. Boyolali	0.1000
Jawa Tengah	205	Kab. Klaten	0.1000
Jawa Tengah	206	Kab. Sukoharjo	0.2446
Jawa Tengah	207	Kab. Wonogiri	0.1000
Jawa Tengah	208	Kab. Karanganyar	0.1124
Jawa Tengah	209	Kab. Sragen	0.1000
Jawa Tengah	210	Kab. Grobogan	0.1000
Jawa Tengah	211	Kab. Blora	0.1000
Jawa Tengah	212	Kab. Rembang	0.1000
Jawa Tengah	213	Kab. Pati	0.1000
Jawa Tengah	214	Kab. Kudus	0.2438
Jawa Tengah	215	Kab. Jepara	0.1000
Jawa Tengah	216	Kab. Demak	0.1000
Jawa Tengah	217	Kab. Semarang	0.1000
Jawa Tengah	218	Kab. Temanggung	0.1000
Jawa Tengah	219	Kab. Kendal	0.1000
Jawa Tengah	220	Kab. Batang	0.1000
Jawa Tengah	221	Kab. Pekalongan	0.1000
Jawa Tengah	222	Kab. Pemasang	0.1000

Provinsi	Nomor	Kabupaten/Kota	Indeks Daerah
Jawa Tengah	223	Kab. Tegal	0.1097
Jawa Tengah	224	Kab. Brebes	0.1000
Jawa Tengah	225	Kota Magelang	0.3955
Jawa Tengah	226	Kota Surakarta	0.9108
Jawa Tengah	227	Kota Salatiga	0.2233
Jawa Tengah	228	Kota Semarang	0.6554
Jawa Tengah	229	Kota Pekalongan	0.2582
Jawa Tengah	230	Kota Tegal	0.2668
DI Yogyakarta	231	Kab. Kulon Progo	0.1000
DI Yogyakarta	232	Kab. Bantul	0.1975
DI Yogyakarta	233	Kab. Gunung Kidul	0.1742
DI Yogyakarta	234	Kab. Sleman	0.4772
DI Yogyakarta	235	Kota Yogyakarta	0.9176
Jawa Timur	236	Kab. Pacitan	0.1000
Jawa Timur	237	Kab. Ponorogo	0.1015
Jawa Timur	238	Kab. Trenggalek	0.1000
Jawa Timur	239	Kab. Tulungagung	0.1104
Jawa Timur	240	Kab. Blitar	0.1000
Jawa Timur	241	Kab. Kediri	0.1000
Jawa Timur	242	Kab. Malang	0.1000
Jawa Timur	243	Kab. Lumajang	0.1000
Jawa Timur	244	Kab. Jember	0.1000
Jawa Timur	245	Kab. Banyuwangi	0.1000
Jawa Timur	246	Kab. Bondowoso	0.1000
Jawa Timur	247	Kab. Situbondo	0.1000
Jawa Timur	248	Kab. Probolinggo	0.1000
Jawa Timur	249	Kab. Pasuruan	0.1116
Jawa Timur	250	Kab. Sidoarjo	0.1702
Jawa Timur	251	Kab. Mojokerto	0.1000
Jawa Timur	252	Kab. Jombang	0.1000
Jawa Timur	253	Kab. Nganjuk	0.1000
Jawa Timur	254	Kab. Madiun	0.1000
Jawa Timur	255	Kab. Magetan	0.1000
Jawa Timur	256	Kab. Ngawi	0.1000

Provinsi	Nomor	Kabupaten/Kota	Indeks Daerah
Jawa Timur	257	Kab. Bojonegoro	0.1000
Jawa Timur	258	Kab. Tuban	0.1000
Jawa Timur	259	Kab. Lamongan	0.1000
Jawa Timur	260	Kab. Gresik	0.1305
Jawa Timur	261	Kab. Bangkalan	0.1122
Jawa Timur	262	Kab. Sampang	0.1000
Jawa Timur	263	Kab. Pamekasan	0.1000
Jawa Timur	264	Kab. Sumenep	0.1000
Jawa Timur	265	Kota Kediri	0.2266
Jawa Timur	266	Kota Blitar	0.1291
Jawa Timur	267	Kota Malang	0.5063
Jawa Timur	268	Kota Probolinggo	0.1680
Jawa Timur	269	Kota Pasuruan	0.2010
Jawa Timur	270	Kota Mojokerto	0.2088
Jawa Timur	271	Kota Madiun	0.2994
Jawa Timur	272	Kota Surabaya	1.0000
Jawa Timur	273	Kota Batu	0.4347
Bali	274	Kab. Jembrana	0.1000
Bali	275	Kab. Tabanan	0.1147
Bali	276	Kab. Badung	0.6734
Bali	277	Kab. Gianyar	0.3733
Bali	278	Kab. Klungkung	0.1370
Bali	279	Kab. Bangli	0.1000
Bali	280	Kab. Karangasem	0.1318
Bali	281	Kab. Buleleng	0.1146
Bali	282	Kota Denpasar	0.9493
NTB	283	Kab. Lombok Barat	0.1000
NTB	284	Kab. Lombok Tengah	0.1000
NTB	285	Kab. Lombok Timur	0.1000
NTB	286	Kab. Sumbawa	0.1000
NTB	287	Kab. Dompu	0.1000
NTB	288	Kab. Bima	0.1000
NTB	289	Kab. Sumbawa Barat	0.1000
NTB	290	Kab. Lombok Utara	0.1000

Provinsi	Nomor	Kabupaten/Kota	Indeks Daerah
NTB	291	Kota Mataram	0.4262
NTB	292	Kota Bima	0.1073
NTT	293	Kab. Sumba Barat	0.1000
NTT	294	Kab. Sumba Timur	0.1000
NTT	295	Kab. Kupang	0.1000
NTT	296	Kab. Timor Tengah Selatan	0.1000
NTT	297	Kab. Timor Tengah Utara	0.1000
NTT	298	Kab. Belu	0.1000
NTT	299	Kab. Alor	0.1000
NTT	300	Kab. Lembata	0.1000
NTT	301	Kab. Flores Timur	0.1000
NTT	302	Kab. Sikka	0.1000
NTT	303	Kab. Ende	0.1000
NTT	304	Kab. Ngada	0.1000
NTT	305	Kab. Manggarai	0.1000
NTT	306	Kab. Rote Ndao	0.1000
NTT	307	Kab. Manggarai Barat	0.1000
NTT	308	Kab. Sumba Tengah	0.1000
NTT	309	Kab. Sumba Barat Daya	0.1000
NTT	310	Kab. Nagekeo	0.1000
NTT	311	Kab. Manggarai Timur	0.1000
NTT	312	Kab. Sabu Raijua	0.1000
NTT	313	Kab. Malaka	0.1000
NTT	314	Kota Kupang	0.1454
Kalimantan Barat	315	Kab. Sambas	0.1000
Kalimantan Barat	316	Kab. Bengkayang	0.1000
Kalimantan Barat	317	Kab. Landak	0.1000
Kalimantan Barat	318	Kab. Mempawah	0.1000
Kalimantan Barat	319	Kab. Sanggau	0.1000
Kalimantan Barat	320	Kab. Ketapang	0.1065
Kalimantan Barat	321	Kab. Sintang	0.1055
Kalimantan Barat	322	Kab. Kapuas Hulu	0.1000
Kalimantan Barat	323	Kab. Sekadau	0.1000
Kalimantan Barat	324	Kab. Melawi	0.1000

Provinsi	Nomor	Kabupaten/Kota	Indeks Daerah
Kalimantan Barat	325	Kab. Kayong Utara	0.1000
Kalimantan Barat	326	Kab. Kubu Raya	0.1370
Kalimantan Barat	327	Kota Pontianak	0.9937
Kalimantan Barat	328	Kota Singkawang	0.1589
Kalimantan Tengah	329	Kab. Kotawaringin Barat	0.1000
Kalimantan Tengah	330	Kab. Kotawaringin Timur	0.2572
Kalimantan Tengah	331	Kab. Kapuas	0.1000
Kalimantan Tengah	332	Kab. Barito Selatan	0.1000
Kalimantan Tengah	333	Kab. Barito Utara	0.1000
Kalimantan Tengah	334	Kab. Sukamara	0.1000
Kalimantan Tengah	335	Kab. Lamandau	0.1000
Kalimantan Tengah	336	Kab. Seruyan	0.1000
Kalimantan Tengah	337	Kab. Katingan	0.1000
Kalimantan Tengah	338	Kab. Pulang Pisau	0.1000
Kalimantan Tengah	339	Kab. Gunung Mas	0.1000
Kalimantan Tengah	340	Kab. Barito Timur	0.1000
Kalimantan Tengah	341	Kab. Murung Raya	0.1000
Kalimantan Tengah	342	Kota Palangka Raya	0.2809
Kalimantan Selatan	343	Kab. Tanah Laut	0.1000
Kalimantan Selatan	344	Kab. Kota Baru	0.1552
Kalimantan Selatan	345	Kab. Banjar	0.1061
Kalimantan Selatan	346	Kab. Barito Kuala	0.1000
Kalimantan Selatan	347	Kab. Tapin	0.1000
Kalimantan Selatan	348	Kab. Hulu Sungai Selatan	0.1000
Kalimantan Selatan	349	Kab. Hulu Sungai Tengah	0.1000
Kalimantan Selatan	350	Kab. Hulu Sungai Utara	0.1000
Kalimantan Selatan	351	Kab. Tabalong	0.1029
Kalimantan Selatan	352	Kab. Tanah Bumbu	0.1024
Kalimantan Selatan	353	Kab. Balangan	0.1000
Kalimantan Selatan	354	Kota Banjarmasin	0.3945
Kalimantan Selatan	355	Kota Banjar Baru	0.1000
Kalimantan Timur	356	Kab. Paser	0.2163
Kalimantan Timur	357	Kab. Kutai Barat	0.1000
Kalimantan Timur	358	Kab. Kutai Kartanegara	0.2912

Provinsi	Nomor	Kabupaten/Kota	Indeks Daerah
Kalimantan Timur	359	Kab. Kutai Timur	0.1081
Kalimantan Timur	360	Kab. Berau	0.1807
Kalimantan Timur	361	Kab. Penajam Paser Utara	0.1000
Kalimantan Timur	362	Kab. Mahakam Ulu	0.1000
Kalimantan Timur	363	Kota Balikpapan	0.4230
Kalimantan Timur	364	Kota Samarinda	0.5475
Kalimantan Timur	365	Kota Bontang	0.2782
Kalimantan Utara	366	Kab. Malinau	0.1000
Kalimantan Utara	367	Kab. Bulungan	0.1000
Kalimantan Utara	368	Kab. Tana Tidung	0.1000
Kalimantan Utara	369	Kab. Nunukan	0.1000
Kalimantan Utara	370	Kota Tarakan	0.2390
Sulawesi Utara	371	Kab. Bolaang Mongondow	0.1000
Sulawesi Utara	372	Kab. Minahasa	0.1000
Sulawesi Utara	373	Kab. Kepulauan Sangihe	0.1000
Sulawesi Utara	374	Kab. Kepulauan Talaud	0.1000
Sulawesi Utara	375	Kab. Minahasa Selatan	0.1000
Sulawesi Utara	376	Kab. Minahasa Utara	0.1000
Sulawesi Utara	377	Kab. Bolaang Mongondow Utara	0.1000
Sulawesi Utara	378	Kab. Siau Tagulandang Biaro	0.1000
Sulawesi Utara	379	Kab. Minahasa Tenggara	0.1000
Sulawesi Utara	380	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	0.1000
Sulawesi Utara	381	Kab. Bolaang Mongondow Timur	0.1000
Sulawesi Utara	382	Kota Manado	0.1833
Sulawesi Utara	383	Kota Bitung	0.1000
Sulawesi Utara	384	Kota Tomohon	0.1239
Sulawesi Utara	385	Kota Kotamobagu	0.1000
Gorontalo	386	Kab. Boalemo	0.1000
Gorontalo	387	Kab. Gorontalo	0.1000
Gorontalo	388	Kab. Pohuwato	0.1000
Gorontalo	389	Kab. Bone Bolango	0.1000

Provinsi	Nomor	Kabupaten/Kota	Indeks Daerah
Gorontalo	390	Kab. Gorontalo Utara	0.1000
Gorontalo	391	Kota Gorontalo	0.1623
Sulawesi Barat	392	Kab. Majene	0.1000
Sulawesi Barat	393	Kab. Polewali Mandar	0.1000
Sulawesi Barat	394	Kab. Mamasa	0.1000
Sulawesi Barat	395	Kab. Mamuju	0.1453
Sulawesi Barat	396	Kab. Mamuju Utara	0.1000
Sulawesi Barat	397	Kab. Pasang Kayu	0.1000
Sulawesi Tengah	398	Kab. Banggai Kepulauan	0.1000
Sulawesi Tengah	399	Kab. Banggai	0.1738
Sulawesi Tengah	400	Kab. Morowali	0.1000
Sulawesi Tengah	401	Kab. Poso	0.1000
Sulawesi Tengah	402	Kab. Donggala	0.1000
Sulawesi Tengah	403	Kab. Toli-Toli	0.1000
Sulawesi Tengah	404	Kab. Buol	0.1000
Sulawesi Tengah	405	Kab. Parigi Moutong	0.1000
Sulawesi Tengah	406	Kab. Tojo Una-Una	0.1000
Sulawesi Tengah	407	Kab. Sigi	0.1000
Sulawesi Tengah	408	Kab. Banggai Laut	0.1000
Sulawesi Tengah	409	Kab. Morowali Utara	0.1000
Sulawesi Tengah	410	Kota Palu	0.1424
Sulawesi Selatan	411	Kab. Kepulauan Selayar	0.1000
Sulawesi Selatan	412	Kab. Bulukumba	0.1000
Sulawesi Selatan	413	Kab. Bantaeng	0.1000
Sulawesi Selatan	414	Kab. Jenepono	0.1000
Sulawesi Selatan	415	Kab. Takalar	0.1000
Sulawesi Selatan	416	Kab. Gowa	0.1000
Sulawesi Selatan	417	Kab. Sinjai	0.1000
Sulawesi Selatan	418	Kab. Maros	0.1000
Sulawesi Selatan	419	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	0.1000
Sulawesi Selatan	420	Kab. Barru	0.1000
Sulawesi Selatan	421	Kab. Bone	0.1000
Sulawesi Selatan	422	Kab. Soppeng	0.1000

Provinsi	Nomor	Kabupaten/Kota	Indeks Daerah
Sulawesi Selatan	423	Kab. Wajo	0.1000
Sulawesi Selatan	424	Kab. Sidenreng Rappang	0.1000
Sulawesi Selatan	425	Kab. Pinrang	0.1000
Sulawesi Selatan	426	Kab. Enrekang	0.1000
Sulawesi Selatan	427	Kab. Luwu	0.1000
Sulawesi Selatan	428	Kab. Tana Toraja	0.1200
Sulawesi Selatan	429	Kab. Luwu Utara	0.1000
Sulawesi Selatan	430	Kab. Luwu Timur	0.1000
Sulawesi Selatan	431	Kab. Toraja Utara	0.1091
Sulawesi Selatan	432	Kota Makassar	0.6215
Sulawesi Selatan	433	Kota Parepare	0.1316
Sulawesi Selatan	434	Kota Palopo	0.1209
Sulawesi Tenggara	435	Kab. Buton	0.1000
Sulawesi Tenggara	436	Kab. Muna	0.1000
Sulawesi Tenggara	437	Kab. Konawe	0.1000
Sulawesi Tenggara	438	Kab. Kolaka	0.1827
Sulawesi Tenggara	439	Kab. Konawe Selatan	0.1000
Sulawesi Tenggara	440	Kab. Bombana	0.1000
Sulawesi Tenggara	441	Kab. Wakatobi	0.1000
Sulawesi Tenggara	442	Kab. Kolaka Utara	0.1000
Sulawesi Tenggara	443	Kab. Buton Utara	0.1000
Sulawesi Tenggara	444	Kab. Konawe Utara	0.1000
Sulawesi Tenggara	445	Kab. Kolaka Timur	0.1000
Sulawesi Tenggara	446	Kab. Konawe Kepulauan	0.1000
Sulawesi Tenggara	447	Kab. Muna Barat	0.1000
Sulawesi Tenggara	448	Kab. Buton Tengah	0.1000
Sulawesi Tenggara	449	Kab. Buton Selatan	0.1000
Sulawesi Tenggara	450	Kota Kendari	0.1000
Sulawesi Tenggara	451	Kota Baubau	0.1000
Maluku	452	Kab. Kepulauan Tanimbar	0.1000
Maluku	453	Kab. Maluku Tenggara	0.1000
Maluku	454	Kab. Maluku Tengah	0.1000
Maluku	455	Kab. Buru	0.1000
Maluku	456	Kab. Kepulauan Aru	0.1000

Provinsi	Nomor	Kabupaten/Kota	Indeks Daerah
Maluku	457	Kab. Seram Bagian Barat	0.1000
Maluku	458	Kab. Seram Bagian Timur	0.1000
Maluku	459	Kab. Maluku Barat Daya	0.1000
Maluku	460	Kab. Buru Selatan	0.1000
Maluku	461	Kota Ambon	0.4331
Maluku	462	Kota Tual	0.1000
Maluku Utara	463	Kab. Halmahera Barat	0.1000
Maluku Utara	464	Kab. Halmahera Tengah	0.1000
Maluku Utara	465	Kab. Kepulauan Sula	0.1000
Maluku Utara	466	Kab. Halmahera Selatan	0.1000
Maluku Utara	467	Kab. Halmahera Utara	0.1000
Maluku Utara	468	Kab. Halmahera Timur	0.1000
Maluku Utara	469	Kab. Pulau Morotai	0.1000
Maluku Utara	470	Kab. Pulau Taliabu	0.1000
Maluku Utara	471	Kota Ternate	0.1014
Maluku Utara	472	Kota Tidore Kepulauan	0.1000
Papua	473	Kab. Merauke	0.1000
Papua	474	Kab. Jayawijaya	0.1000
Papua	475	Kab. Jayapura	0.1074
Papua	476	Kab. Nabire	0.2736
Papua	477	Kab. Kepulauan Yapen	0.1000
Papua	478	Kab. Biak Numfor	0.1271
Papua	479	Kab. Paniai	0.1000
Papua	480	Kab. Puncak Jaya	0.1000
Papua	481	Kab. Mimika	0.1264
Papua	482	Kab. Boven Digoel	0.1000
Papua	483	Kab. Mappi	0.1000
Papua	484	Kab. Asmat	0.1000
Papua	485	Kab. Yahukimo	0.1000
Papua	486	Kab. Pegunungan Bintang	0.1000
Papua	487	Kab. Tolikara	0.1000
Papua	488	Kab. Sarmi	0.1000
Papua	489	Kab. Keerom	0.1000
Papua	490	Kab. Waropen	0.1000

Provinsi	Nomor	Kabupaten/Kota	Indeks Daerah
Papua	491	Kab. Supiori	0.1000
Papua	492	Kab. Mamberamo Raya	0.1000
Papua	493	Kab. Nduga	0.1000
Papua	494	Kab. Lanny Jaya	0.1000
Papua	495	Kab. Mamberamo Tengah	0.1000
Papua	496	Kab. Yalimo	0.1000
Papua	497	Kab. Puncak	0.1000
Papua	498	Kab. Dogiyai	0.1000
Papua	499	Kab. Intan Jaya	0.1000
Papua	500	Kab. Deiyai	0.1000
Papua	501	Kota Jayapura	0.3125
Papua Barat	502	Kab. Fak-Fak	0.1000
Papua Barat	503	Kab. Kaimana	0.1000
Papua Barat	504	Kab. Teluk Wondama	0.1000
Papua Barat	505	Kab. Teluk Bintuni	0.1544
Papua Barat	506	Kab. Manokwari	0.3020
Papua Barat	507	Kab. Sorong Selatan	0.1000
Papua Barat	508	Kab. Sorong	0.1000
Papua Barat	509	Kab. Raja Ampat	0.1000
Papua Barat	510	Kab. Tambrau	0.1000
Papua Barat	511	Kab. Maybrat	0.1000
Papua Barat	512	Kab. Manokwari Selatan	0.1000
Papua Barat	513	Kab. Pegunungan Arfak	0.1000
Papua Barat	514	Kota Sorong	0.1000

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

